

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. IPM di Papua sudah membaik dari tahun ke tahun, akan tetapi masih tertinggal 10-12 poin dari rata-rata IPM Nasional. Secara parsial, terjadi kesenjangan pembangunan ekonomi dimana IPM Kabupaten/Kota di Papua berkisar dari 30-80 poin.
2. Dana Otonomi Khusus di Papua didominasi oleh pengalokasian Kabupaten/Kota dan 5 kab/kota dengan IPM terendah mendapatkan Dana Otonomi Khusus yang lebih besar. Dari analisis regresi ditemukan bahwa dana Otsus berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikan dengan nilai p value 0,006.
3. PDRB ADHK di Kabupaten/Kota di Papua memiliki kesenjangan yang tinggi dimana Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura pada tahun 2019 memiliki nilai PDRB berkali-kali lipat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Hasil regresi menunjukkan bahwa PDRB ADHK tidak berpengaruh negatif terhadap IPM dengan nilai signifikan dengan nilai p value 0,477.
4. Jumlah rumah tangga di Papua meningkat setiap tahunnya dan didominasi oleh Kota Jayapura. Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif signifikan dari banyaknya jumlah rumah tangga terhadap IPM dengan P Value 0,000.
5. Model penelitian menggunakan panel data dan fixed effect model, serta tidak ditemukan gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan data berdistribusi normal.

#### **5.2 Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan adalah untuk efektifitas dana Otsus melalui transparansi dan program kerja yang tepat sasaran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan indikator IPM, mulai dari pendidikan, pendapatan, dan kesehatan agar Papua tidak hanya mengejar ketertinggalan dari IPM Nasional

tapi juga terjadi pemerataan antar Kabupaten/Kota. Selain itu peneliti mendukung pemerintah setempat untuk melakukan pemerataan pendapatan daerah dengan indikator PDRB dan distribusi penduduk yang lebih merata.

